



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

KECAMATAN SANGATTA UTARA 2024

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara. Kinerja Kecamatan Sangatta Utara diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Sangatta Utara pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sangatta Utara, Januari 2025

Camat



Hasdiah, SE., M. Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197412212001122002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sangatta Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kondisi Wilayah

Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 2 yang mengatur pembagian wilayah Negara “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”, bahwa Camat sebagai pimpinan Kecamatan disamping melaksanakan tugas pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk urusan otonomi daerah, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan kelurahan;

- h. Melaksanakan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- j. Mengkoodinasikan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

gambaran geografis wilayah Kecamatan yang terkait dengan faktor – faktor penunjang kegiatan Bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan yang secara rinci diuraikan sebagai berikut :

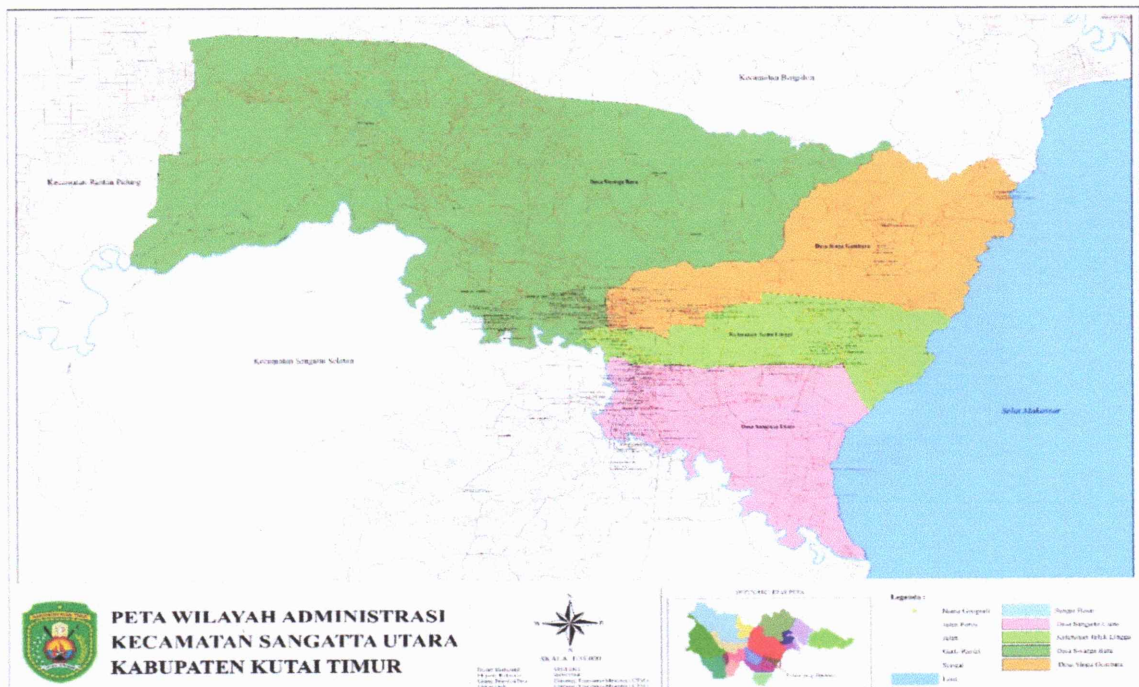
Kecamatan Sangatta Utara adalah salah satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, terletak di sebelah selatan dari ibu kota Kabupaten Kutai Timur (Sangatta Utara) yang merupakan pusat pengembangan kawasan Kutai Timur dengan batas – batas wilayah :

Utara : Kecamatan Bengalon

Timur : Selat Makassar

Selatan : Kecamatan Sangatta Selatan

Barat : Kecamatan Rantau Pulung



Luas wilayah + 33.356,74 Ha atau 333,57 km² yang terdiri dari :

1. Kelurahan Teluk Lingga : $\pm 3.144,66$ Ha
2. Desa Sangatta Utara : $\pm 4.756,20$ Ha
3. Desa Singa Gembara : $\pm 5.648,78$ Ha
4. Desa Swarga Bara : $\pm 19.807,10$ Ha

Penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan, sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan, sementara sebagai subjek, penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan, oleh karena itu, penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara. Jumlah penduduk Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2024 sesuai data profil Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024 sebanyak ± 116.630 jiwa, terdiri dari 61.020 Laki-laki dan 55.610 perempuan.

Jumlah Penduduk Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024

No	Uraian	Kelurahan Teluk Lingga	Desa Sangatta Utara	Desa Singa Gembara	Desa Swarga Bara	Jumlah
1	Laki-Laki	11.561	29.948	9.877	9.634	61.020
2	Perempuan	11.208	26.948	8.797	8.797	55.610
	Jumlah	22.769	56.896	18.674	18.431	116.630

Sumber : Profil Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024

Dapat dilihat dari Tabel diatas penduduk laki-laki di Kecamatan Sangatta Utara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Dalam pembangunan suatu wilayah, salah satu aspek yang sangat penting adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM berkualitas mencakup individu-individu yang memiliki pendidikan, keterampilan, dan motivasi untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan mereka sendiri, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai prioritas utama melalui program-program pembangunan yang difokuskan pada pendidikan, baik dalam bentuk formal maupun non-formal, dengan target yang tepat dan relevan. Angka Partisipasi Sekolah Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 7-12 tahun

menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai APS Kecamatan Sangatta Utara mencapai 99,37%, meningkat dari sebelumnya Tahun 2021 hanya 91,17%. Sementara itu, pada kelompok usia 13-15 tahun juga terjadi peningkatan nilai APS dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai APS mencapai 68,00%, naik dari nilai sebesar 65,20% pada tahun 2021.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kondisi Aparatur adalah potensi Aparatur Kecamatan yang merupakan ujung tombak Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi bagi para aparat kecamatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia maka aparat yang ada perlu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja dedikasi dan loyalitasnya. Data Aparatur Kecamatan sebagai berikut :

Daftar Pegawai ASN Kantor Camat Sangatta Utara Tahun 2024

NO	NAMA	GOL/ RUANG	JABATAN
1.	Hj. Hasdiah, SE.,M.Si	IV/b	Camat
2.	Muhamad Yunus, SE., M.Si	IV/a	Sekretaris Kecamatan
3.	Nani Uminarti,S,Th,M.Si	IV/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4.	Elysabeth Artikawati,S.ST	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5.	Nurbaya, SE	III/d	Kasi Pemerintahan Umum
6.	Bernadus Parembang,SP	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

7.	Siti Marfuah, SE	III/d	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
8.	Noorma, S.STP	III/d	Lurah
9.	Dra. Hariyati	III/d	Sekretaris Lurah
10.	Muhammad Rusdi Amin, SE	III/d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
11.	Hj. Mardiana, S.Sos	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	Yusfina Pamilangan, S.M	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
13.	Yulinda Oktriana, S.Sos	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
14.	Evrin Abriantikah, S.IP	III/c	Fasilitator Pemerintahan
15.	Arrang Bulan, SE	III/c	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
16.	Abd. Wahab Agus, SE	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
17.	Nurhayati, S.A.P	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
18.	Hj. Munawwarah, S.Sos	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
19.	Yanti Tonapa, SH	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan
20.	Artanti, S.Sos	III/a	Fasilitator Pemerintahan
21.	Durahman, SE	III/a	Pamong Pemerintahan
22.	Leginem Rohayanti	III/a	Penata Layanan Operasional
23.	Muhammad Yamani	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
24.	Wilhelmus Wio Doi, SE	III/a	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
25.	Abdul Syakeer	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
26.	Muhammad Azis Padu	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
27.	Muslim Azhari	II/d	Penata Layanan Operasional
28.	Dorina Lara Saty	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
29.	Ahmad Sodikin	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
30.	Rafli Diasamo	II/d	Penata Layanan Operasional
31.	Suro Edipudjono	II/d	Penata Layanan Operasional
32.	Nono Hariyanto	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
33.	Dahliah	II/c	Pengadministrasi Perkantoran
34.	Taufik Rahman, A.Md	VII	Arsiparis Terampil

Daftar Pegawai Tenaga Honorer Kantor Camat Sangatta Utara

NO	NAMA	STATUS	JABATAN
1	M. Jami	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
2	Slamet Zaenal Arifin	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
3	Devi Puspitasari, SE	TK2D	Penata Layanan Operasional
4	Dindum	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
5	Prihatin, SE	TK2D	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Arifain	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
7	Ruslan	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
8	Rusdi Rasyid	TK2D	Pengelola Data dan Informasi
9	Supran	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
10	Yevita Nugraha Sagita Palinggi, S.Hut	TK2D	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Hj. Fauzah Maulidiyah, SE	TK2D	Penelaah Teknis Kebijakan
12	Erviyani, S.I.Kom	TK2D	Penelaah Teknis Kebijakan
13	Arman	TK2D	Pengelola Data dan Informasi
14	Novianti Dudung	TK2D	Pengelola Data dan Informasi
15	Indariyana Rusnong	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
16	Linda Jumiati Siregar, SE	TK2D	Penata Layanan Operasional
17	Reni Jaya, SE	TK2D	Pengelola Data dan Informasi
18	Belly Pratama Ersal, AP	TK2D	Penata Layanan Operasional
19	Siti Fatimah	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
20	Kasifah, S.IP	TK2D	Pamong Pemerintahan
21	Astri Utari, S.M	TK2D	Penata Layanan Operasional
22	Fajar Alhamdani	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
23	Gresya	TK2D	Penata Layanan Operasional
24	Sarah Sriyanti Siaba	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
25	Achmad Suryansyah Al Payet	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran

26	Jeni Widiandini	TK2D	Pengelola Data dan Informasi
27	Eka Widarna	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
28	Bejo Selamat, S.Hut	TK2D	Penalaah Teknis Kebijakan
29	H. Wahyu Purwadi, S.Sos	TK2D	Penata Kelola Pemerintahan
30	Ahmad Musyafi	TK2D	Penata Layanan Operasional
31	Samsul	TK2D	Penata Layanan Operasional
32	Muh. Hardiansyah Mustapa	TK2D	Penata Layanan Operasional
33	Ramadhani Asmianata, S.Sos	TK2D	Penalaah Teknis Kebijakan
34	Areskya Rahmah, S.Pi	TK2D	Penalaah Teknis Kebijakan
35	Elda Destarini	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran
36	Wahidah, S.P	TK2D	Penalaah Teknis Kebijakan
37	Nurhikmah Mustapa	TK2D	Pengadministrasi Perkantoran

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kantor Camat Sangatta Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Klasifikasi berdasarkan tipe Kecamatan Sangatta Utara masuk dalam Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas dengan beban kerja yang besar Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas :

A. Susunan Organisasi Kecamatan, yaitu :

1) Camat, mempunyai tugas :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat Kecamatan, yaitu

2) Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Menyiapkan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretariat Kecamatan, membawahi sub bagian yang dipimpin kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris Kecamatan :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perelengkapan dan pemeliharaan, hokum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta asset, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program monitoring evaluasi dan pelaporan.

3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, mempunyai tugas :

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertical terkait;
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat masyarakat di Kecamatan;
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayah Kecamatan;
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan;
- Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertical yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha;

- Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas

:

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan di Desa;
- Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- Kegiatan pemberdayaan kelurahan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- Evaluasi Kelurahan;
- Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan;
- Peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan;
- Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga kemasyarakatan;
- Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM);
- Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kelurahan.

5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

- Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Bupati;
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6) Seksi Pemerintahan Umum, mempunyai tugas :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Bupati;
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antar sukudun intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Penangan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan.

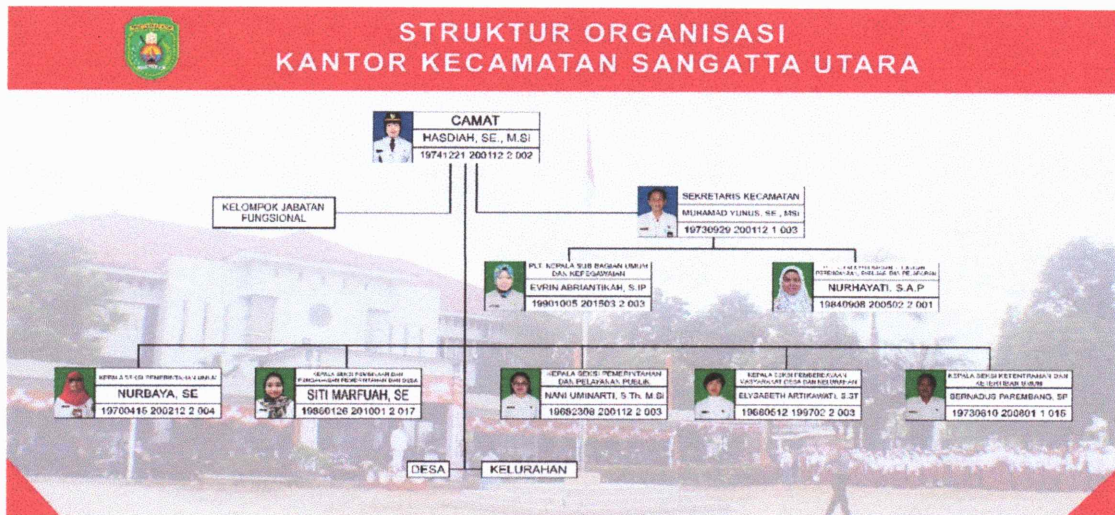
7) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, mempunyai tugas :

- Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;
- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa;
- Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi/Sub Bagian. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat dimasa yang akan datang dalam rangka menunjang Pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Sangatta Utara periode 2021-2026 sebagai berikut :

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sangatta Utara.
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sangatta Utara.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Sangatta Utara periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD

Kecamatan Sangatta Utara untuk cukup baik terlihat dari 3 tahun capaian indikator terealisasi semuanya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan pelayanan dan lain-lain
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ Internasional . Dari visi dan misi Kantor Kecamatan Sangatta Utara terhadap pencapaian visi Kabupaten yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan teknologi
- Misi 5 : Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi Pembangunan yang berwawasan lingkungan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Sangatta Utara mengacu pada Misi ke-1 dan Ke-4, yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan Bersatu
- b. Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan teknologi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 6 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	61,80	70	73	74	75
2	Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan kesatuan masyarakat	Ketahanan Nasional					
3	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	68	69,72	71,32	72,93	74,53

Sumber : Renstra Kecamatan Sangatta Utara periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah yang baik	1.1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan (Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah)	%	Persentase jumlah dokumen administrasi perkantoran dan laporan keuangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang terealisasi}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus dilaporkan}} \times 100 \%$	Sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan sub bagian umum dan kepegawaian
2.	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	2.1 Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah target Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan	Kasi Pemerintahan Umum

		Ketahanan Nasional (Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum)		Ketahanan Nasional (Penyelenggara n Urusan Pemerintahan Umum) yang dilaksanakan	Pemerintahan Umum) – realisasi Jumlah Pembinaan Mawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum)		
3.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	3.1	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan (Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)	%	Jumlah presentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Jumlah realisasi Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan (Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan) Jumlah Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan (Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan) x 100%	Kasi pembudayaan desa dan Kelurahan

		3.2	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Pelanggaran	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diterbitkan	Jumlah data Pelanggaran Perda/Perkada yang telah diterbitkan Jumlah data yang ada x 100%	Kasi Ketentraman dan ketertiban umum
		3.3	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Pelayanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan administrasi yang diproses / Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik x 100%	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3.4	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan	%	Presentase Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan	Jumlah data Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan/ Jumlah target Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan	Kasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa

			Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan x 100%	
--	--	--	---------------------------	--	---------------------------	---	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara Tahun

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024.

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	1 Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP		70
2	Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	1 Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	5
3	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	1 Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)		69,72

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya tata Kelola organisasi pemerintah yang baik	1.1	Presentase capaian tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	%	100
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa	2.2	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum)	Kegiatan	5
3	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	3.1	Persentase Peran Masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan	%	100

			(Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)		
		3.2	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Pelanggaran	0
		3.3	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Pelanggaran	20
		3.4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	%	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Sangatta Utara :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian tata kelola Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100%	9.759.187.615
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	411.000.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	7.041.708.078
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	260.936.800
1.4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.001
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan	3 Laporan	932.906.946

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	373.696.400
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	648.200.000
1.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	55.739.390
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggara an Pelayanan Publik	39 Layanan	140.000.000
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	70.000.000

2.2	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	70.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %	360.000.000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	250.000.000
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	5.000.000
3.3	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Laporan	105.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0 Pelanggaran	150.000.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	110.000.000

4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	40.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	500.000.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	500.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan	100%	175.000.000
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	175.000.000
	Kantor Lurah Teluk Lingga			

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian tata kelola Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100%	1.700.000.000
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	44.700.000
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	267.725.000
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.319.200.000
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	54.000.000
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	14.375.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	1.319.200.000

		Pemerintahan Daerah		
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %	5.002.045.000
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	5.002.045.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan September tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan Anggaran Pada Tahun dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya tata Kelola organisasi pemerintah yang baik	1.1	Presentase capaian tata Kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	%	100

2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa	2.2	Jumlah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum)	Kegiatan	5
3	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	3.1	Persentase Peran Masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan (Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan)	%	100
		3.2	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Pelanggaran	0
		3.3	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik)	Pelanggaran	20
		3.4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	%	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangattan Utara Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian tata kelola	100%	11.340.993.747

	DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	370.564.500
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	8.446.424.210
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	260.936.800
1.4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	35.000.001
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	1.398.769.646
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	393.976.400

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	331.032.800
1.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	104.289.390
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggara an Pelayanan Publik	39 Layanan	140.000.000
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	70.000.000
2.2	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	70.000.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Peran Masyarakat	100 %	360.000.000

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan		
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	250.000.000
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	5.000.000
3.3	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	1 Laporan	105.000.000
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0 Pelangg aran	150.000.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	110.000.000
4.2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	40.000.000

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	728.000.000
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	728.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan	100%	175.000.000
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	175.000.000
	Kantor Lurah Teluk Lingga			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan	100%	5.713.152.436
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	44.700.000

		Perangkat Daerah		
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	57.675.000
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	549.335.250
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.319.200.000
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	54.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.319.200.000
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100 %	5.713.152.436

2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	5.713.152.436
-----	---------------------------------------	--	--------------	---------------

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024
(setelah perubahan)*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sangatta Utara.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan tata Kelola organisasi pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	70				IKU Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Presentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	5 Kegiatan				IKU Kecamatan Sangatta Utara Tahun 2024
3	Meningkatnya status kemajuan dan	Presentase indeks Pembangunan Desa (IPD)	69,72				IKU Kecamatan Sangatta Utara

	kemandirian desa						Tahun 2024
--	------------------	--	--	--	--	--	------------

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
2	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	70,00			73		
3	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	69,72			69,72		

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketransparanan dan Ketertiban	Cakupan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (penyelenggaraan urusan pemerintahan umum)	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Cakupan peran masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan (pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan)	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%

		ahan Desa (Desa dengan pelapora n keuanga n tertib dan baik)			
2	Meningkatnya Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Penyelen ggaraan Pelayana n Publik (rata-rata nilai survey kepuasa n masyara kat terhadap pelayana n publik di Kecamat an)	1 Laporan	1 Laporan	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Jumlah Dokume n SAKIP (Nilai Predikat AKIP merupak an hasil pengukur an Kinerja OPD)	70	73	100%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Sangatta Utara
Rata-rata 97,66%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerjaserita alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024

N o.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
1.1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100 %	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai

							pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.
1. 1. 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
1. 1. 1. 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaa	Jumlah Fasilitas penyelenggaraan pembinaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam

	n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
1. 1. 1. 2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	100 Orang	100 Orang	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

		Nasional					
1. 1. 1. 3	penanganan Konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15 Laporan	15 Laporan	100 %	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	69,72				Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga

							dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD

							secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1.1.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1.1.2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai

		gunan di desa					pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1.1.3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1.2	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Dengan berpedoman pada kewenangan yang dimiliki Kecamatan maka program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara

							konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.1.2.1	peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0 Pelanggaran	0 Pelanggaran	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan

	n dan Ketertiban Umum	Upaya Penyele nggaraa n Ketentra man dan Ketertib an Umum				sesuai dengan kewenanga n	ikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a
2. 2. 1. 1	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmoni sasi Hubung an dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyar akat	2 Lap ora n	2 Lapora n	100 %	Pemenuha n anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenanga n	Program kerja yang direncanaka n diakomodas ikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a
2. 3	Program Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintahan Desa	Cakupa n fasilitasi pembin aan, pengaw asan pemerin tah desa dan lembga kemasy arakata n	100 %	100%	100%	Pemenuha n anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenanga n	Program kerja yang direncanaka n diakomodas ikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat

							dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.3.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.3.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2.3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penguasaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen

		laan Keuang an Desa dan Penday agunaa n Aset Desa				kewenanga n	perencanaa n sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a
2. 3. 1. 3	Koordinasi Pendamping an Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordin asi Pendamp ingan Desa di Wilayah nya	3 Lap ora n	3 Lapora n	100%	Pemenuha n anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenanga n	Program kerja yang direncanaka n diakomodas ikan dalam dokumen perencanaa n sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a
2. 4	Program Penyelengg araan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyele nggaraa n Pelayan an Publik	39 Lay ana n	39 Layana n	100%	Pemenuha n anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenanga n	Program kerja yang direncanaka n diakomodas ikan dalam dokumen perencanaa n sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan

							anggarannya
2. 4. 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	39 Layanan	39 Layanan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
2. 4. 1. 1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	73			Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai

							pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100 %	100%	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA

		dokumen DPA-SKPD					SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

3. 1. 2. 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang menerima gaji	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3. 1. 2. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3. 1. 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA

							SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.3.1	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

3.1.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA

							SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

3.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	28 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA

							SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya listrik, air dan wifi kantor	3 Laporan	3 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya

3.1.6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	11 Unit	100%	Pemenuhan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan	Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA

	Dinas Jabatan	yang Dipeliha ra dan dibayark an Pajakny a					SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a
3. 1. 7. 2	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralata n dan Mesin Lainnya yang Dipeliha ra	41 unit	41 unit	100%	Pemenuha n anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenanga n	Program kerja yang direncanaka n diakomodas ikan dalam dokumen perencanaa n sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a
3. 1. 7. 3	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun an Lainnya yang Dipeliha ra/Direh abilitasi	5 unit	1 Unit	20%	Pemenuha n anggaran program dan kegiatan sesuai dengan kewenanga n	Program kerja yang direncanaka n diakomodas ikan dalam dokumen perencanaa n sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggaranny a

Uraian penjelasan tabel :

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Sangatta Utara mempunyai Tujuan,sasaran,program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaiannya sesuai dengan target yang dibuat, factor pendukungnya sesuai dengan Pemenuhan anggaran program dan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan dan Program kerja yang direncanakan diakomodasikan dalam dokumen perencanaan sampai pada Renja dan DPA SKPD secara konsisten, sehingga dapat dipenuhi kebutuhan anggarannya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o.	Tujuan/ Sasaran	Indikat or Kinerja	% Capai an	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capai an	Menunja ng/Tidak Menunja ng
1.	Meningkatk an tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP		Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persenta se capaian tata kelola Administ rasi Perkant oran Dan Laporan Keuanga n	89%	Menunja ng
				Kegiatan Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	5 Dokum en	Menunja ng

				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	Menunjang

					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi yang menerima gaji	1 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah target penatausahaan keuangan skpd	1 Dokumen	Menunjang

				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan pendataan dan pengolahan kepegawaian	1 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan	Jumlah Paket	1 Paket	Menunjang

				n Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	Menunjang

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya listrik, air dan wifi kantor	3 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1 Laporan	Menunjang

				han Daerah	Pemerintah Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Menunjang
2.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	39 Layanan	Menunjang

				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkat	Jumlah Lembaga Kemasya	15 Lembaga	Menunjang

				an Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rakatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemas yaraka tan	
				Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningka tan Efektivita s Kegiatan Pemberd ayaan Masyarakat di Wilayah Kecamat an	1 Lapora n	Menunja ng
				Kegiatan Pemberda yaan Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksan aan Kegiatan Pemberd ayaan Keluraha n	1 Lapora n	Menunja ng
				Sub Kegiatan Peningkat an Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencana an Pembangu	Jumlah Lembaga Kemasya rakatan yang Berpartisi pasi dalam Forum Musyawa rah Perencan aan	15 Lemba ga	Menunja ng

				nan di Kelurahan	Pembang unan di Keluraha n		
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggan Perda/Perkada	0 Pelanggan	Menunja ng
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	Menunja ng
				Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Menunja ng
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	Menunja ng

				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	3 Laporan	Menunjang

					Wilayahnya		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Menunjang
3.	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 Kegiatan	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Laporan	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 orang	Menunjang

				dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
				Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	100 Orang	Menunjang

				Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15 Laporan	Menunjang
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Sangatta Utara mempunyai Tujuan,sasaran,program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaiannya sesuai dengan target yang ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	KECAMATAN SANGATTA UTARA	12.893.993.747	11.035.861.860	85,59%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.143.803.603	8.261.984.932	90,35 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	140.000.0000	114.514.934	81,80 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	360.000.000	311.011.700	86,39 %
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.000.0000	145.249.100	96,83 %
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	728.000.000	552.444.185	75,89 %
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	175.000.000	161.092.900	92,05 %

	KANTOR LURAH TELUK LINGGA	7.738.062.686	6.900.012.314	89,17 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.024.910.250	1.297.288.924	64,07 %
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.713.152.436	5.602.723.390	98,07 %

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Tahun 2024

N o.	Tujuan/Sas aran	Indikator Kinerja			Anggaran			Ting kat Efisi ensi
		Targ et	Reali sasi	% Capaian	Angga ran (Rp.)	Realis asi (Rp.)	% Capaian	
1.	Meningkatk an tata kelola organisasi pemerintah yang baik	70			11.16 8.713. 853	9.559 .273.8 56	85,59%	
2.	Meningkatn ya Status Kemajuan dan Kemandiria n Desa	69,7 2			6.073. 152.43 6	5.913. 735.0 90	97,38%	
3.	Meningkatn ya wawasan kebangsaan serta persatuan dan	5 Kegi atan	5 Kegia tan	100%	728.00 0.000	552.4 44.18 5	75,89%	75,89

	kesatuan masyarakat							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien si
		Tar get	Realis asi	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realis asi (Rp)	% Capai an	
KECAMATAN SANGATTA UTARA								
1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/ KOTA	100 %	100%	100%	12.893 .993.74 7	11.035. 861.86 0	85,59 %	85,89 %
2	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	39	39	100 %	140.00 0.0000	114.51 4.934	81,80 %	81,8%
3	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAHA N	100 %	100 %	100 %	360.00 0.000	311.0 11.700	86,39 %	86,39%
4	PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIB AN UMUM	0	100 %	100 %	150.00 0.0000	145.24 9.100	96,83 %	96,83 %

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5 Kegiatan	100 %	100 %	728.00 0.000	552.44 4.185	75,89 %	75,89%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	100 %	175.00 0.000	161.09 2.900	92,05 %	92,05 %
KELURAHAN TELUK LINGGA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100%	100%	2.024.9 10.250	1.297.2 88.92	64,07 %	64,07 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100%	100%	5.713.1 52.436	5.602.7 23.390	98,07 %	98,07 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 3 (Tiga) tujuan 3 (Tiga) sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 85% (kategori Tinggi)
- Tujuan 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 97,38% (kategori Sangat Tinggi)
- Tujuan 3 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 75,89% (kategori Sedang)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 tujuan tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 untuk total anggaran Kecamatan Sangatta Utara sebesar Rp. 20.632.056.433,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.935.874.174,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran

86,93% terdiri dari anggaran Kecamatan Sangatta Utara Rp. 12.893.993.747,- dengan realisasi anggaran 11.035.861.860 dengan presentase realisasi 85,59% sedangkan untuk Kelurahan Teluk Lingga Rp. 7.738.062.686,-sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.6.900.012.314,- dengan presentase realisasi anggaran mencapai 89,17%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta Utara, Januari 2025


Camat
Hasdiah, SE., M.Si
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197412212001122002